## BAB II KAJIAN PUSTAKA

## KAJIANPUSTAKA

## KAJIAN PENELITIANTERDAHULU

Tinjauan pustaka memuat bahasan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, dalam bentuk bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian dan juga terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian Berikut ini beberapa hasil dari penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan untuk peneliti.

**TABEL 2.1**

**HASIL PENELITIAN TERDAHULU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Peneliti** | **Judul Penelitian** | **Metode Analisis** | **Variabel** | **Hasil** |
| 1 | Firginia Lita Takbir Very Londa Deysi Tampongan goy (2016) | Efektivitas Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara | Kualitatif | Pengawasan Camat, dan Penyelenggara an Pemerintahan Desa | Pengawasan Camat di kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara sudah cukup efektif. Bila ada penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, tindakan korektif dilakukan secara langsung oleh Camat. Misalnya melalui  diskusi dengan hukum tua. |
| 2 | Suwinli  Juhandi L., Salmin | Pengawasan  Camatdalam Pelaksanaan | Kualitatif | Pembinaan, Pengawasan | Pengawasan Camat secara langsung masih |

7

8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dengo, dan Very Londa (2017) | Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (Suatu Studi di Kecamatan Kauditan Kabupaten  3Minahasa Utara) |  | Camat, APBDes | belum optimal. Camat jarang mengawasi langsung ke desa.  Tindakankorektif yang diberikan belum optimal, cenderung berdasar administratif. |
| 3 | Electranand a Anugerah Ash- shidiqqi (2018) | Model pengawasan dan pembinaan camat dalam pengelolaan dana desa | Hukum Normatif | Pembinaan dan Pengawasan Camat, Dana Desa | Pembinaan dan pengawasan oleh camat terkendala oleh regulasi akan kewenangan dan peran sebagai OPD bergantung pada peraturan Kabupaten/kota. |

## Teori Administrasi

Administrasi bila dilihat secara etimologis, berasal dari kata “*ad”* dan juga *“ministrate”* yang berarti melayani, menghasilgunakan, mendayagunakan, membantu mengelola, memenuhi, melaksanakan, mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan.

Menurut **Sondang P. Siagian,** yang dikutip oleh **Inu Kencana Syafiie,** dalam buku **Ilmu Administrasi Publik** pengertian administrasi adalah sebagai berikut:

“Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan – keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya” (Syafiie, 2006)

9

Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa, administrasi sebagai suatu proses kerja sama melalui interaksi dua orang atau lebih dalam rangka mengambil keputusan demi pencapaian tujuan bersama. Kegiatan administrasi dilakukan baik di dalam suatu organisasi swasta maupun publik, sebagaimana yang dikemukakan oleh **Leonard B. White** dalam buku yang berjudul **Dasar - Dasar Administrasi Publik** yaitu “Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat di setiap usaha kelompok baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, usahakecil maupunbesar”(Maksudi, 2017)

Berdasarkan definisi di atas, jelas bahwa kegiatan di dalam administrasi akan berhubungan dengan bagaimana penggerakan, hingga pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki suatu organisasi demi tercapainya tujuan organisasional. Yang manasumber dayaini menjadiunsur unsur yangsaling terkait. Sebagaimana yang dikemukakan oleh **The Liang Gie** dalam bukunya berjudul **Administrasi Perkantoran Modern,** yang menyatakan bahwa adadelapan unsur dari administrasi, yaitu:

* + - 1. Pengorganisasian, adalah rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah atau tempat bagi setiap kegiatan dalam usaha kerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan.
      2. Manajemen, adalah rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan dan mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerja sama yang telah ditetapkan bear- benartercapai.
      3. Tata hubungan, adalah rangkaian perbuatan menyampaikan warta atau berita dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerjasama.
      4. Kepegawaian, adalah rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerja sama.

10

* + - 1. Keuangan, merupakan rangkaian perbuatan mengelola segi- segipembelanjaandalamusahakerjasama.
      2. Perbekalan, merupakan rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara sanpai menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukandalanusahakerjasama.
      3. Tata usaha, merupakan rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukandalamusahakerjasama.
      4. Perwakilan, merupakan rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerja sama yang dilakukan (Gie, 2009)

Berdasarkan pendapat di atas, administrasi sebagai rangkaian proses yang memiliki unsur – unsur yang terkait satu sama lain. Dalam pencapaian tujuan suatu organisasi tak lepas dari yang namanya kerja sama yang harmonis, selaras dan saling memberikan kontribusi satu sama lain demi kemajuan suatu organisasi.

## Teori Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan proses di mana sumber daya manusia dan sumber - sumber lain seperti sarana, prasarana, moda, dan juga teknologi yang diorganisasi dan juga dikelola untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Peranan administrasi publik pada dasarnya sebagai upaya dalam proses pencapaian tujuan negara secara efektif dan efisien. Mengingat betapa pentingnya administrasi dalam kehidupan manusia, tidak berlebihan jika **Charles A. Beard** dalam **Dimock dan Dimock (1986 : 21)** yang dikutip oleh **Beddy Iriawan Maksudi** di dalam buku yang berjudul **“Dasar-Dasar Administrasi Publik”** mengemukakan bahwa:

11

“Tidak ada suatu hal untuk abad modern sekarang ini dari bidang administrasi. Kelangsungan hidup pemerintah dan beradab dan malahan kelangsungan hidup dari peradaban itu sendiri akan tergantung atas kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu ilmu dan falsafah di semua praktik administrasi yang sanggup menyelesaikan fungsi- fungsi umum masyarakat yang beradab .” (Maksudi, 2018)

Administrasi publik sebagai disiplin ilmu mempunyai cakupan material atau ruang lingkup luas yang menjadi pusat perhatian. **Dimock dan Dimock** yang dikutip oleh **Beddy Iriawan Maksudi** di dalam buku yang berjudul **“Dasar- Dasar Administrasi Publik”** mengemukakan bahwa:

“Administrasi Publik merupakan suatu bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa, disusun digerakan dan kemudian dikendalikan.” (Maksudi, 2018)

Menurut **Chandler dan Plano** dalam **Keban** yang dikutip oleh **Harbani Pasolong** dalam buku **Teori Administrasi Publik** mengatakan bahwa administrasipublik adalah sebagai berikut:

“Administrasi Publik adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan – keputusan dalam kebijakan publik.” (Pasolong, 2010)

Dari pengertian di atas administrasi publik merupakan proses yang ditujukan untuk mengatur pejabat publik dalam melaksanakan tugas - tugas yang ditentukan. Administrasi publik memiliki hal khusus, sebagaimana yang dikemukakan oleh **Inu Kencana Syafiie,** dalam buku **Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia,** terdapat 7 hal khusus yang dimiliki oleh Administrasi Publik, yaitu:

12

1. tidak dapat dielakkan;
2. senantiasa mengharapkan ketaatan;
3. mempunyai prioritas;
4. mempunyai pengecualian;
5. puncak pimpinan politik;
6. sulit diukur;
7. terlalu banyak mengharapkan dari adminisrasi publik. (Syafiie, 2012)

## Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu negara. Hal ini berkaitan dengan bagaimana suatu negara dalam proses pencapaian tujuan negara dan juga berkaitan dengan politik. Maka, hal ini dapat dimengerti senada dengan yang dikemukakan oleh A. Hoogerwert, kebijakan publik sebagai unsur penting dari politik, dapat diartikan juga sebagai mencapai tujuan - tujuan tertentu menurut waktu tertentu. **(Margono, 2003)**

Kebijakan publik juga berkaitan dengan seseorang atau sekelompok pelaku, sebagaimana yang dikemukakan oleh **Anderson** dalam **Modul Analisis Kebijakan Publik** bahwa**:**

“Kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.” (Suwitri, 2014)

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa memang satu tujuan dibuatnya kebijakan publik adalah untuk memecahkan suatu permasalahan dalam suatu negara.

13

**Budi Winarno** dalam bukunya menyebut bahwa perumusan kebijakan sebagai serangkaian proses yang merujuk pada aspek - aspek bagaimana masalah - masalah menjadi perhatian aktor pembuat kebijakan publik, hingga bagaimana kebijakan dipilih dari berbagai alternatif yang saling berkompetisi.

Dalam melengkapi definisi Kebijakan Publik, penulis mengutip juga pendapat **Thomas R. Dye** dalam buku **Under Standing Public Police** yang mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai:

“ … *public policy is whatever governments choose to do or not todo. Note that we are focusing not only on government action. But also on government inaction, that is, what government choose; not to do. We contend that government inaction can have just a great an impact on socisty as government action.*”

Kebijakan publik, menurut **Dye** sedikit berbeda dengan pendapat di atas. Bahwa menurut **Dye** ini, kebijakan publik sebagai suatu kegiatan pemerintah yang harus diikuti masyarakat. Baik pemerintah mengambil suatu tindakan, meupun tidak. Kebijakan merupakan upaya memahami dan mengartikan sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam suatu masalah, penyebabnya, dan pengaruh serta dampak dari kebijakan publik tersebut.

Berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas memang beragam namun dengan inti yang sama. Penulis dapat simpulkan bahwa kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan atau juga keputusan dari pelaku yang mana dalam hal ini pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak bagi kehidupan masyarakat.

14

## Teori Implementasi Kebijakan Publik

## 2.1.5.1 Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata *implementation* berasal dari kata kerja *to implement*. menurut Webster‟s Dictonary yang dikutip oleh **Tachjan** dalam buku **Implementasi Kebijakan Publik,**

“Kata *implement* berasaldaribahasa latin *implementum* dari asal kata *impere* dan *plere*. Kata *implere* dimasudkan *to fill up; to filll in* yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan *plere* maksudnya *to fill* yaitu mengisi.” (Tachjan, 2006)

Lebih lanjut, **Tachjan** mengemukakan bahwa secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana atau untuk memperoleh hasil.

Maka, bila dikaitkan dengan kebijakan publik, implementasi Kebijakan Publik menurut **Van Meter dan Van Horn** yang dikutip oleh **Kamal Alamsyah** dalam bukunya yang berjudul **Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi** bahwa:

"Implementasi Kebijakan Publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.” (Alamsyah, 2016)

Hal seperti di atas dapat dimengerti, bahwa bagaimana sumber - sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan publik.

15

Yang mana di dalamnya mencakup tiga unsur yang saling menunjang, yaitu sumber daya manusia, kemampuan anggaran dan kemampuan organisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

## Unsur- Unsur Implementasi Kebijakan Publik

Dalam implementasi kebijakan publik, tentu ada unsur – unsur yang harus ada dalam prosesnya. Ini dibahas oleh **Smith** yang dikutip oleh **Tachjan** dalam buku **Implementasi Kebijakan Publik** menuliskan bahwa unsur – unsur tersebut yaitu: “(1) unsur pelaksana (*implementor*), (2) adanya program yang akan dilaksanakan, (3) *target groups*”. (Tachjan, 2006)

Pertama, adanya unsur pelaksana. Unsur pelaksana dalam implementasi kebijakan publik diterangkan oleh Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan **Dimock & Dimock** yang dikutip oleh **Alamsyah** bahwa:

”Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian”. (Alamsyah, 2016)

16

Kedua, yaitu adanya program. Maka, penulis setuju dengan pendapat **Tachjan** bahwa pada hakikatnya implementasi kebijakan sebagai implementasi program. Hal ini seperti dikemukakan oleh **Grindle** yang dikutip oleh **Tachjan** bahwa “*Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect*”.**(Tachjan, 2006)**

Ketiga, yaitu adanya *target group.* Menurut **Tachjan** bahwa:

Target group (kelompok sasaran), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya

17

oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. (Tachjan, 2006)

Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa dalam hal implementasi kebijakan publik terdapat unsur – unsur yang mengikat. Mulai dari unsur pelaksana, adanya program, hingga adanya *target group*. Ketiga unsur tersebut saling mempengaruhi dan terikat satu sama lain, yang mana menungjang terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

## Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan dalam prosesnya terdapat faktor - faktor ataupun tentang hambatan ataupun kendala yang dapat mengakibatkan gagalnya suatu implementasi. Maka, penulis mengutip pendapat beberapa ahli mengenai beberapa model serta faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan diantaranya yaitu menurut **Edwards** yang dikutip oleh **Riant Nugroho** dalam buku **Public Policy** bahwa:

“ .. Edwards menyarankan untuk memperhatikan empat isu

pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu

*communication, resource, disposition or attitudes,* dan

*bureaucratic structures.”* (Nugroho, 2017)

Keempat isu tersebut menurut **Edwards** saling mempengaruhi satu sama lain. Lebih lanjut, **Yulianto Kardji** dalam buku **Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas,** menerangkan bahwa:

18

“Dalam proses implementasi kebijakan, komunikasi memegang peranan penting karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada implementor secara tepat, dan konsisten. Kurangnya sumber daya akan berakibat ketidak- efektifan penerapan kebijakan. Disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan dan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka implementor bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi para implementor juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Akhirnya struktur birokrasi mempunyai dampak atas penerapan dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut.” (Kardji, 2016)

Adanya komunikasi yang baik, *resources,* disposisi, dan juga struktur birokrasi yang baik, menurut pendapat di atas akan membawa dampak yang baik terhadap keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan publik. Kemudian penulis mengutip teori dari **Van Meter** dan **Van Horn** yang ditulis dalam buku **Public Policy**, bahwa:

“Beberapa variabel yang dimasukan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel:

* + - * 1. Standar dan ukuran kebijakan;
        2. Sumber daya;
        3. Karakteristik organisasi pelaksana;

Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan;

* + - * 1. Sikap para pelaksana;
        2. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.” (Nugroho, 2017)

## Teori Pembinaan

Setiap tujuan organisasi, dalam proses pencapaiannya diperlukan adanya suatu tindakan atau untuk memastikan bahwa kegiatan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan arah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya serta memperoleh hasil yang lebih baik.

19

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Miftah Thioha dalam buku yang berjudul Kepemimpinan dalam Manajemen (2003:182), bahwa: “Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik.”

Melalui pembinaan, suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan dapat diarahkan secara teratur dan terarah agar lebih berdaya dan berhasil guna. Dalam hal organisasi, ini berkaitan dengan pencapaian tujuan suatu organisasi. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Masdar Helmi dalam buku Dakwah dalam Alam Pembangunan bahwa:

“Pembinaan adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.”

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dalam hal pembinaan, penulis mengambil kesimpulan bahwa pembinaan sebagai upaya atau usaha untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai agar lebih efektif dan efisien. Dengan begitu usaha atau aktivitas yang dilakukan akan lebih terarah dan teratur, bila dalam organisasi hal ini berkaitan erat dengan proses pencapaian tujuan organisasi.

20

## Dana Desa

Kini dalam mewujudkan kemandirian desa, pemerintah menggulirkan stimulus berupa dana untuk desa yang mana dapat dimanfaatkan untuk program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut **PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa,** disebutkan bahwa:

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.” (PP No. 43 tahun 2014)

Melalui pengertian dari peraturan di atas, dapat diketahui bahwa dana desa dapat digunakan untuk mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan juga untuk pemberdayaan masyarakat.

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dalam APBDes.. Maka dari itu, dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Tujuan dari dana desa sendiri, Menurut **Kemenkeu** seperti yang dimuat dalam **Buku Saku Dana Desa,** yaitu:

* + - 1. Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa;
      2. Mengentaskan kemiskinan;
      3. Memajukan perekonomian desa;

21

* + - 1. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa;
      2. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. (Kemenkeu,2018)

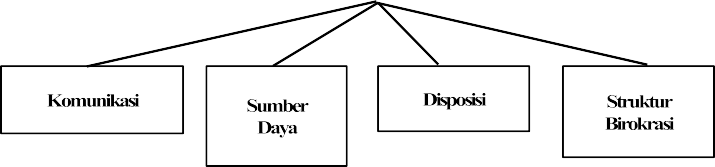
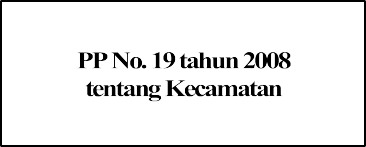
Dana Desa yang berjumlah besar ini dalam pengeloaannya sangat perlu adanya transparansi anggaran yang penting untuk diketahui oleh masyarakat umum. Maka, dalam hal pengelolaannya pun, harus didasarkan pada prinsip – prinsip pengelolaan keuangan desa, dalam **Buku Saku Dana Desa,** yaitu:

1. Transparan;
2. Akuntabel;
3. Partisipatif;
4. Tertib dan disiplin anggaran.(Kemenkeu, 2018)

Dari beberapa teori di atas, dapat dilihat bahwa bagaimana pentingnya pengelolaan dana desa secara efektif dan efisen, sehingga desa pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya dimulai dari desa akan lebih meningkat lagi.

22

## KERANGKA BERPIKIR



**Implementasi Kebijakan Pembinaan Program Dana Desa**

**GAMBAR 2.1**

Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori dan fenomena di lapangan mengenai bagaimana implementasi kebijakan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung dalam membina pengelolaan dana desa. Kajian teoritis yang holistik sangat diperlukan untuk mempermudah dalam pemecahan masalah. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori dari Edwards III.

Berangkat dari PP No 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, bahwa Kecamatan memiliki fungsi untuk Pembinaan dan Pengawasan Desa, salah satunya mengenai Pengelolaan Dana desa. Dalam hal implementasi kebijakan ini, setelah melihat fenomena di lapangan, belum efektifnya pembinaan

23

pengelolaan dana desa oleh kecamatan dipengaruhi oleh 4 isu yang mana relevan dengan Teori Edwards III..

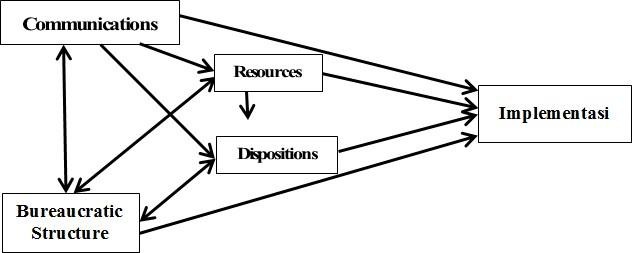
Secara konseptual dari Teori Edwards III mengemukakan bahwa: “Policy implementation,…is the stage of policy making between the establishment of a policy…and the consequences of the policy for people whom is affects”. Rumusan di atas berarti, implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari suatu program yang ditujukan untuk mencapai tujuan dari kebijakan.

Menurut **Edwards** yangdikutipoleh **Riant Nugroho** dalambuku **Public Policy** bahwa:

“ ..Edwardsmenyarankanuntukmemperhatikanempatisu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resource, disposition or attitudes,* dan *bureaucratic structures.”*

Keempat isu tersebut menurut **Edwards** saling mempengaruhi.

Keterkaitan tersebut dapat digambarkan sebagaimana di bawah ini:



**Gambar 2.2**

***Direct and Indirect Impact on Implementation***

**Sumber: Buku Implementasi Kebijakan Publik oleh Tachjan**

24

Berdasarkan model implementasi oleh Edwards III (1980) itulah kajian terhadap implementasi kebijakan kecamatan dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Kecamatan Pasirjambu akan dianalisis, sehingga dapat diperoleh deskripsi bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Kecamatan Pasirjambu dalam pembinaan program dana desa di tahun anggaran 2020 ini.

Pemilihan model implementasi kebijakan dari Edwards III didasarkan pada pertimbangan bahwa esensi teori yang dikembangkan oleh pakar tersebut dirasa cukup relevan dengan konteks masalah yang akan dikaji. Dimana keempat faktor tersebut secara empirik sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan pengawasan oleh kecamatan.

Terlebih, dalam tahun anggaran 2020 ini, dimana Indonesia dihadapkan pada masa khusus maka dalam pengelolaan dana desa salah satunya memerlukan perhatian yang cukup serius. Komunikasi, Sumber daya, Disposi, dan juga Struktur Birokrasi ini akan dapat terlihat saling terkait satu sama lain, dan menentukan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Kecamatan Pasirjambu.

Berangkat dari berbagai alasan di atas, maka penulis berasumsi bahwa keberhasilan implementasi kebijakan kecamatan dalam pembinaan pengelolaan dana desa, selain ditentukan oleh proses, tujuan dan sasaran kebijakan juga ditentukan oleh hasil akhir atau *output* dari kebijakan tersebut. Secara esensial, bagaimana kualitas pengelolaan dana desa ini akan tercermin dari bagaimana penerapan atau implementasi kebijakan yang dilakukan oleh kecamatan.

25

## PREPOSISI

Preposisi dalam **KBBI** adalah Ungkapan yang dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Lebih lanjut menurut **Rahardjo**, Preposisi sebagai hubungan antara dua konsep, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan,

Dalam penelitian ini, berdasarkan kerangka berpikir di atas, peneliti mengambil proposisi penelitian sebagai berikut:

* + 1. Pembinaan oleh Kecamatan Pasirjambu dapat meningkatkan kualitas pengelolaan program dana desa.